

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros

Febriyanty Fajry R

(Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: febriyantyf@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and to analyze the effort of local government to overcome poverty in Maros regency and factors that influence it. To achieve the objectives the researcher using a method of qualitative research and exploring data descriptively. The data collecting technique was done through observation, in-depth interview, document and archive by using qualitative analysis technique. The result study shows two things: first, the effort of local government to overcome poverty that conducted by Department of Social, Labor and Transmigration and Department of Cooperation, Industrial and Trading of Maros regency through the poverty overcoming program includes Expectancy Family Program (PKH), the Poor Empowerment Program (KUBE-FM) and Micro, Small, Medium-Sized Enterprise Empowerment Program. Second, in its implementation there are several factor that influence it, consist of supporting and inhibiting factor. The supporting factor is the presence of commitment between state and local government, good coordination inter actor who involved, the cooperation between related parties, the motivation of each members to participate in each activities, integrated organization structure and technological utilization. And the inhibiting factors is the lack of poor understanding about sanction if violate the obligation, restricted budget, the lack of human resources quality, the lack of relationship for each member, the lack of ability that owned by bussines actor and inadequate means and infrastructure.

Keywords: policy, government, poverty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal : Pertama, upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, melalui program penanggulangan kemiskinan yang meliputi program keluarga harapan (PKH), program pemberdayaan fakir miskin (KUBE-FM) dan program pemberdayaan UMKM. Kedua, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni adanya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah, adanya koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat, adanya kerjasama antar pihak yang terkait, adanya motivasi dari dalam diri setiap anggota untuk mengikuti setiap kegiatan, adanya struktur organisasi yang terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi. Dan yang menjadi faktor penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi jika

melanggar kewajiban, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas sumber daya manusia, adanya hubungan yang kurang baik antar anggota, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kata Kunci: kebijakan, pemerintah, kemiskinan

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Telah sama-sama dapat dilihat bahwa kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu global, artinya kemiskinan tidak hanya menjadi pokok masalah di Negara Dunia Ketiga, tetapi juga menjadi persoalan di Negara Maju. Hampir disemua Negara berkembang, sedikit penduduk hidup dapat menikmati hasil pembangunan, mayoritas penduduk hidup melarat. Strategi pembangunan yang diterapkan tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan rakyat miskin, sebaliknya malah membuat mereka semakin sengsara.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya

pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan.

Begitupun dengan kondisi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Maros merupakan salah satu contoh daerah yang masih mengalami permasalahan kemiskinan. Permasalahan penduduk miskin diantaranya ialah jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, kemampuan sumber daya dan keterampilan penduduk miskin sangat terbatas, kesehatan / gizi keluarga miskin masih rendah, kemampuan keluarga miskin menyekolahkan anak sangat terbatas. Serta belum ditunjang dengan kebijakan daerah yang belum optimal.

Berdasarkan laporan badan pusat statistik Kabupaten Maros Tahun 2010-2015 menyatakan bahwa jumlah dan presentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 46.662 ribu jiwa atau 14,61% dan turun menjadi 42.440 ribu jiwa atau 13.17% pada tahun 2011. Memasuki tahun 2012, jumlah penduduk miskin sebesar 40.889 ribu jiwa atau 12,57% dan naik menjadi 43.059 ribu jiwa atau 12.94% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 jumlahnya menjadi 40.130 ribu jiwa atau 11.93%.

Sumber daya alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap wilayah sampai saat ini belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Maros. Terbukti

dengan masih relatif tingginya angka kemiskinan, dan membuktikan pula bahwa pemerintah Kabupaten Maros belum sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih relatif tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros saat ini, antara lain:

- a) Pendidikan merupakan faktor utama penyebab kemiskinan, padahal telah diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia seseorang bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Pendidikan yang semakin rendah menggambarkan kualitas sumber daya manusianya rendah yang dapat menyebabkan penduduk miskin. Semakin tinggi pendidikan seseorang, kesempatan untuk mendapat kehidupan lebih baik akan semakin besar, karena mempunyai kualitas dalam mencari pekerjaan.
- b) Kemiskinan juga erat kaitannya dengan jumlah anggota keluarga karena menggambarkan beban keluarga. Menurut Jingham (2000), penambahan penduduk sebagai akibat dari tingginya kelahiran menyebabkan beban hidup keluarga semakin berat. Beban hidup keluarga semakin berat apabila menanggung kerabat misalnya orang tua maupun sanak famili. Sedangkan menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Selain jumlah anggota rumah tangga besar, di dalam rumah tangga miskin ditemukan lebih banyak anggota yang kurang produktif bila dibandingkan dengan keluarga yang tidak miskin.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini memberikan gambaran seputar upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros.

Adapun jenis data penelitian:

- a. Data Primer
Data Primer adalah data peneliti yang di dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara *face to face* untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih muda.
- b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta penelusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.
- b. Wawancara mendalam (*indep interview*)

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan *face to face* kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara *indeep interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

c. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari

program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 28 Tahun 2010 tentang Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan. Didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dimana program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

a) Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Bantuan Sosial

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan. Program-program dimaksud, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program penanggulangan kemiskinan yang termasuk kluster 1 (satu).

Program penanggulangan kemiskinan kluster 1 (satu) merupakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Program keluarga harapan (PKH) mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Program ini merupakan produk kebijakan untuk menanggulangi permasalahan sosial. Pada tahun pertama penerapannya, daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2013 termasuk di Kabupaten Maros dan diterapkan di semua Kecamatan sampai saat ini.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah peserta PKH yang berasal dari sekretariat PKH Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2016 berjumlah 19.672 peserta, dengan rincian sebagai berikut, tahun 2013 peserta PKH berjumlah 5001, Selanjutnya pada tahun 2014, Kecamatan Turikale baru memulai untuk melaksanakan program keluarga harapan, jadi semua kecamatan yang ada di kabupaten maros telah melaksanakan program tersebut, sehingga masyarakat miskin yang menjadi peserta PKH bertambah dengan jumlah 5.042 ribu. Di tahun 2015 peserta PKH menurun menjadi 4.850 ribu masyarakat miskin. Dan pada tahun 2016 peserta PKH juga mengalami penurunan, sehingga jumlah masyarakat miskin yaitu 4.780 ribu.

Terkait dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, didalam suatu keluarga sudah tidak memiliki syarat, baik syarat dibidang pendidikan maupun dibidang kesehatan yang akan diberikan bantuan PKH,

dan adanya peserta PKH yang pindah dari Kabupaten Maros.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Maros, terdapat seorang personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH disetiap kecamatan dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam kurun waktu cepat dan tepat.

Berdasarkan laporan dari sekretariat PKH Kabupaten Maros terkait dengan jumlah pendamping dari program keluarga harapan yang akan membantu dan membina masyarakat miskin dari tahun ke tahun meningkat. Di tahun 2013 jumlah pendamping sebanyak 30 orang dan dibantu oleh 1 orang yang menjadi operator, dimana operator bertugas mengelolah semua data-data peserta PKH. Selanjutnya, di tahun 2014 pendamping bertambah menjadi 31 orang dan operator tetap 1 orang. Pada tahun 2015 salah seorang pendamping diangkat menjadi koordinator kabupaten yang mengawasi semua tugas dari pendamping PKH, sehingga jumlah pendamping sebanyak 30 orang. Dan tahun 2016 jumlah pendamping meningkat menjadi 36 orang dan 1 orang koordinator kabupaten serta 1 orang operator yang akan bekerjasama dalam melaksanakan PKH.

Peran pendamping PKH diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka sehingga perlu ada pendamping yang siap untuk membantu mereka mendapatkan hak dan mendampingi mereka untuk memenuhi kewajiban PKH.

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan oleh kementerian sosial yaitu :

- a) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dari rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Salah satu tujuan dari program keluarga harapan adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin. Dengan program ini, keluarga miskin juga diharapkan memiliki kesehatan yang baik seperti kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita.

Status kesehatan adalah refleksi dari kegiatan pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan dan pencatatan dari operator unit pelaksana PKH Kabupaten Maros, diperoleh informasi data bahwa persentase komponen sehat yang tidak komitmen dari total komponen sehat peserta PKH yang termasuk ibu hamil, ibu nifas dan balita dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan.

- b) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Program keluarga harapan yang mulai dilakukan pada tahun 2013 di Kabupaten Maros bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang menjadi penerima PKH.

Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan harus dibarengi dengan komitmen para anak-anak keluarga miskin penerima PKH dengan diwajibkan memenuhi persyaratan yang berlaku berkaitan dengan pendidikan, sehingga anak-anak tersebut tetap menerima bantuan yang akan menunjang pendidikannya.

Berdasarkan hasil presentase total komponen anak didik yang dari tahun ketahun semakin meningkat. Sedangkan presentase komponen anak didik yang tidak komitmen semakin menurun dari

tahun ke tahun. Jadi dalam hal ini, tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sudah cukup maksimal.

b) Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (KUBE-FM)

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat perlu terus dilakukan. Untuk mengatasi kemiskinan, perlu sebuah sikap yang jelas yang berupa pemihakan kepada arah pembangunan yang mengarah pada peningkatan produktivitas kerja masyarakat miskin. Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yakni program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM).

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan masyarakat miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE-FM. Secara sosial, KUBE-FM menjadi wadah bergabungnya masyarakat miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. Melalui KUBE-FM masyarakat miskin dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik, yang pada akhirnya menikat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, memberi kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses

sumber-sumber dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang demokratis.

Adapun tujuan dari program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) yang ditetapkan oleh kementerian sosial yang diarahkan kepada upaya percepatan penghapusan kemiskinan, yaitu:

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok,
- 2) Peningkatan pendapatan,
- 3) Pengembangan usaha,
- 4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan laporan dari dinas sosial Kabupaten Maros, jumlah kelompok usaha bersama yang menerima bantuan yakni 95 kelompok di enam kecamatan, dengan rincian, di Kecamatan Simbang terdapat 15 KUBE-FM, selanjutnya di Kecamatan Moncongloe, Camba dan Bantimurung masing-masing terdapat 20 KUBE-FM, serta di Kecamatan Cenrana dan Bontoa terdapat 10 KUBE-FM.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan KUBE-FM ini terlaksana di enam Kecamatan. Karena, hanya enam kecamatan tersebut yang mengusulkan pembentukan kelompok usaha bersama walaupun dinas sosial dalam hal ini bidang pemberdayaan fakir miskin dan pelayanan anak telah melakukan upaya sosialisasi tentang program tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Dalam program ini, adapun prosedur yang harus dijalani oleh masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha melalui program KUBE yaitu masyarakat miskin terlebih dahulu membentuk kelompok, kemudian melakukan proses pendaftaran dan pengajuan proposal kepada

Dinas Sosial kabuapten maros untuk selanjutnya diseleksi, kemudian pihak Dinas Sosial akan melakukan verifikasi atau proses seleksi terhadap proposal yang diajukan. Kelompok KUBE-FM yang pengajuan proposalnya dinyatakan lolos seleksi selanjutnya akan diberikan bantuan modal usaha untuk menjalankan usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota kelompok.

Prosedur dan langkah-langkah tersebutlah yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok usaha bersama dalam pendaftaran KUBE-FM agar dapat menerima bantuan dari program tersebut. Selain itu pihak dinas sosial juga dibantu oleh pihak kelurahan untuk mendampingi kelompok dan memberikan pengarahan yang dibutuhkan oleh kelompok dalam mengurus pendaftaran, mulai dari pembuatan proposal hingga pengelolaan dana yang cair nantinya.

Selanjutnya terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial kepada kelompok usaha bersama fakir miskin. Dimana sosialisasi menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program tersebut. Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

Proses sosialisasi program KUBE-FM yang dilakukan oleh dinas sosial sendiri berjalan kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dana untuk membiayai proses sosialisasi tersebut. Media komunikasi yang cukup sederhana ini menghambat

kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengakses program KUBE-FM ini. Selain itu, masih kurangnya respon masyarakat terhadap program ini lebih dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang konsep program KUBE-FM yang diberikan oleh dinas sosial kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena proses sosialisasi program yang dilakukan oleh dinas sosial masih tergolong sangat minim. Sebelum program ini terlaksana, pihak dinas sosial memang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini namun tidak cukup sering sehingga masih banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan program ini, menjadi tidak mendapatkan informasi dan akses yang baik untuk ambil bagian dalam program ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dinas sosial agar lebih bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat fakir miskin selaku sasaran dari program KUBE.

Kemudian mengenai ketepatan sasaran dimana dalam sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan program tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Demikian pula dengan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan yang ada, hendaknya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tergolong fakir miskin yang memang membutuhkan bantuan ini. Dan kelompok yang bisa mendapatkan bantuan KUBE-FM ini hanya kelompok yang memenuhi persyaratan dan memenuhi kriteria.

Pemerintah dalam hal ini dinas sosial Kabupaten Maros telah menetapkan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok yang ingin mendapatkan bantuan melalui program KUBE, agar program pemberdayaan masyarakat miskin ini tepat sasaran, sehingga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kelompok yang akan mendapatkan bantuan melalui program KUBE nantinya diharapkan akan mengurangi dan nantinya menghapus kemiskinan di kabupaten maros.

Selanjutnya mengenai struktur kepengurusan KUBE-FM pada hakekatnya dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari setiap anggotanya.

Struktur KUBE tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE. Tidak ada suatu struktur yang baku, strukturnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok. Struktur organisasi KUBE yang relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi KUBE, yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara. Jika diperlukan dapat dibentuk urusan atau seksi. Secara umum berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka uraian tugas dari struktur diatas sebagai berikut:

- a) Ketua
 - 1) Mengkoordinir kepengurusan KUBE
 - 2) Mengkoordinir kegiatan KUBE
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain
- b) Sekretaris
 - 1) Melaksanakan tugas administrasi
 - 2) Membuat laporan kegiatan
- c) Bendahara

- 1) Melaksanakan tugas administrasi keuangan
 - 2) Mengelola keuangan
 - 3) Membuat laporan keuangan secara periodik
- d) Anggota

Selanjutnya, dalam pelaksanaan suatu program, masalah anggaran tentu merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tanpa adanya sumber pendanaan dan penganggaran yang baik, pelaksanaan suatu program akan mengalami hambatan serta tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, salah satu aspek pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah yang dijalankan selama ini adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program-program yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) yang faktor keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya adalah masalah pendanaan/anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program ini. Adapun bantuan anggaran untuk KUBE-FM yang diberikan di kabupaten maros berasal dari bantuan dana dari kementerian sosial dan dinas sosial provinsi sul-sel, dan di kabupaten maros sendiri belum menganggarkan dana untuk kelompok usaha bersama fakir miskin, hal ini dikarenakan adanya kendala dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh KUBE-FM itu sendiri.

Kemudian terkait dengan mekanisme pemberian bantuan yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten maros kepada kelompok usaha bersama fakir miskin yakni dengan memberikan bantuan langsung ke rekening masing-masing kelompok yang terdaftar. Setelah menerima bantuan, masing-masing

KUBE-FM mengelola bantuan tersebut sesuai dengan usaha yang tertera dalam proposal. Dalam mengelola bantuan tersebut KUBE-FM didampingi oleh pendamping dari dinas sosial, agar bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

c) Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor usaha yang memiliki peran yang besar dalam memberikan kontribusi serta dapat mendorong perekonomian secara regional hingga nasional. Selain itu, sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam menopang sendi-sendi perekonomian daerah. Strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang UMKM mendefinisikan:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria

usaha kecil sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha mikro, kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan data rekapitulasi perkembangan UMKM perkecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2016, adapun jumlah UMKM yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yakni sebanyak 30.963 dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros.

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Maros sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan sektor yang membidangi UMKM telah memberikan upaya pemberdayaan semaksimal mungkin. Adapun bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh dinas koperindag Kabupaten Maros secara umum sebagai berikut :

1. Pelatihan dan Pengembangan Usaha bagi pelaku UMKM

Pelatihan berguna untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM sehingga mampu menciptakan produk yang berdaya saing di pasaran. Pelatihan bagi pelaku UMKM menjadi salah satu strategi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pelatihan melibatkan perolehan keahlian,

konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan keterampilan.

Berdasarkan data jumlah UMKM yang telah mengikuti diklat, pelatihan, workshop dan berbagai sosialisasi yang diberikan oleh dinas koperindag Kabupaten Maros, Dinas Koperasi dan UKM provinsi, serta pihak-pihak yang terkait, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yakni jumlah usaha mikro menjadi jenis usaha yang paling banyak mengikuti berbagai diklat, pelatihan, serta sosialisasi yang diadakan baik dari Dinas Koperindag Kab. Maros, maupun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sul-Sel, ataupun dari pihak-pihak yang ikut serta didalam pemberdayaan UMKM, dibandingkan jenis usaha kecil dan menengah, dengan rincian jumlah 551 jenis usaha mikro, 232 jenis usaha kecil dan 90 jenis usaha menengah.

Adapun pelatihan terakhir yang diberikan oleh diskoprindag yakni pelatihan wirausaha baru yang nantinya akan mencetak calon pengusaha yang mampu membuat produk olahan sendiri yang dapat bernilai dan mampu bersaing di pasaran. Dan lokasi untuk pelatihan ditentukan berdasarkan hasil keputusan dari musrembang di berbagai kecamatan yang hasilnya bahwa pelatihan bisa dilaksanakan di kantor desa atau kantor camat. Kemudian alokasi dananya bersumber dari dana APBD Kabupaten Maros.

2. Permodalan dan Kemitraan

Bantuan modal dan kemitraan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Maros merupakan sesuatu yang penting dimana suatu usaha dapat berjalan ketika adanya modal dan menjalin kemitraan. Memulai usaha, faktor penentunya berupa bantuan modal. Bantuan modal untuk pelaku UMKM yang diwadahi oleh dinas Koperindag dalam hal ini berasal dari dana APBN dan dana APBD. Didalam dana APBD Kab.Maros menetapkan bahwa adanya pemberian bantuan yang berupa peralatan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM.

Mengenai kemitraan, Dinas koprindag melakukan kemitraan dengan bank pelaksana dan para pengusaha besar untuk memberikan bantuan baik berupa bantuan modal maupun bantuan lainnya kepada UMKM sehingga dapat memajukan usaha mereka.

3. Kelembagaan Usaha (Perizinan)

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten maros yaitu adalah peraturan bupati nomor 17 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 56 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Dalam peraturan tersebut diatur tentang hak dan kewajiban camat untuk melayani masyarakat atau pelaku usaha dalam pembuatan surat izin usaha, mikro, kecil dan menengah. Dimana keluarnya peraturan tersebut merupakan tindak lanjut atas kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai landasan hukum UMKM.

Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, salah satunya dalam hal perizinan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu dengan adanya surat izin usaha yang dimiliki, semua pelaku UMKM mempunyai hak dan kewajiban. Dimana hak semua pelaku UMKM yaitu mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam mendapatkan bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pihak lain. Kemudian kewajiban dari pelaku UMKM yaitu wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Dan dengan adanya peraturan tersebut koordinasi antara dinas koprindag dengan camat membuat jarak antara pemerintah dengan masyarakat atau pelaku UMKM semakin dekat, sehingga tidak ada lagi kecanggungan yang timbul. Kemudian masyarakat dan pelaku UMKM dapat lebih mudah dalam membuat surat izin usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga

semua pengusaha di kabupaten maros sudah memiliki izin usaha.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

a) Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung terlaksananya PKH di kabupaten maros yaitu pertama adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan program keluarga harapan guna membantu memutus rantai kemiskinan ditingkat masyarakat miskin.

Kedua. adanya koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat dalam melaksanakan PKH. Aktor tersebut meliputi perangkat daerah dan perangkat desa, dalam bidang pendidikan aktor yang berperan yaitu guru/wali kelas yang harus melakukan absensi rutin agar partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat terpantau, dan dalam bidang kesehatan aktor yang terlibat yaitu bidan. Dimana bidan harus selalu memantau perkembangan kondisi kesehatan dan gizi dari ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Dengan adanya koordinasi dari aktor-aktor terkait maka program ini akan berjalan dengan baik. karena itu dukungan dari berbagai aktor inilah yang diharapkan nantinya akan lebih mampu meningkatkan kualitas hidup rumah tangga sangat miskin.

b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Faktor penghambat merupakan sebuah acuan bagi pelaksanaan program

sebagai hasil evaluasi. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH yaitu pertama, kurang pemahannya masyarakat miskin terhadap sanksi jika melanggar kewajiban atau komitmen yang telah ditetapkan baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan.

Kedua, yaitu kurangnya dukungan finansial yang dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu pendanaan juga menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dibutuhkan anggaran yang cukup, sehingga pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat miskin sebagai tujuan program dapat meningkat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program KUBE-FM

a) Faktor Pendukung Pelaksanaan Program KUBE-FM

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok Usaha Bersama fakir miskin (KUBE-FM), tidak lepas dari adanya beberapa faktor yang mendukung program tersebut. Dimana faktor yang pertama yaitu adanya kerjasama yang terjalin baik antara semua pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin yang akan menunjang kualitas hidup mereka, dan nantinya akan memutus rantai kemiskinan yang ada di kabupaten maros

Kedua, adanya motivasi untuk mengikuti setiap kegiatan dalam program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM). Partisipasi anggota dalam

setiap kegiatan dalam KUBE-FM merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan pelajaran dan juga merupakan keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih bernilai. Perubahan yang lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga mereka.

b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Program KUBE-FM

Faktor yang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama fakir-miskin (KUBE-FM) yakni pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten. Sumber daya manusia merupakan hal penting dan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Kedua, terbatasnya anggaran yang dimiliki. Masalah anggaran tentu merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan jalannya suatu program agar mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tanpa adanya sumber pendanaan dan penganggaran yang baik, pelaksanaan suatu program akan mengalami hambatan serta tidak akan berjalan dengan lancar.

Ketiga, terkadang ada hubungan kurang baik antar anggota, sehingga menimbulkan rasa bosan dalam menjalankan suatu usaha. Hubungan kurang baik bisa membuat kelompok menjadi tidak kompak yang menyebabkan anggota menjadi tidak betah mengikuti kegiatan dalam kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM). Disamping itu, merasa bosan dengan aktivitas yang dilakukan juga sebagai penyebab anggota keluar dan mencari pekerjaan lainnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM

a) Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di kabupaten maros. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung terlaksananya program tersebut yaitu pertama adanya struktur organisasi yang terintegrasi. Dengan adanya kejelasan didalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UMKM di kabupaten maros. Dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten maros merupakan badan pemerintah daerah yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan UMKM.

Kedua, pemanfaatan teknologi. Adanya teknologi yang dimanfaatkan oleh dinas yang merupakan upaya untuk membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan memasarkan produk-produk mereka. Tentu saja hal itu merupakan peluang bagi pelaku UMKM agar produk mereka lebih dikenal oleh masyarakat luas yang tentu saja akan berdampak pada meningkatnya omset penjualan.

b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM

Selain faktor pendukung dalam program pemberdayaan masyarakat miskin melalui UMKM ini, juga terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala terlaksananya program ini. Faktor yang pertama yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Dimana sumber daya manusia

merupakan titik sentral yang sangat penting, sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan sumber daya manusia UMKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Kedua, kemampuan (skill) yang masih kurang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam melakukan terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif. Pelaku UMKM harus memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana menciptakan suatu produk yang kreatif dan bagaimana memasarkan produknya.

Ketiga, belum memudahinya sarana dan prasana dalam mendistribusikan produk-produk dari para pelaku UMKM. Dimana sarana dan prasana merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM. Dan jika sarana dan prasana lengkap akan lebih memudahkan para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka.

KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari program-program yang dilakukan. Adapun program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam menanggulangi kemiskinan yakni program bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH), program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM), dan

program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adapun pelaksanaan program-program ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang kurang maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun secara keseluruhan pelaksanaan program keluarga harapan, program KUBE-FM dan program pemberdayaan UMKM ini sudah cukup baik dilihat dari terlaksananya program-program tersebut, tersalurkannya bantuan sesuai dengan rencana dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, adanya koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat, adanya kerjasama yang terjalin baik antara semua pihak-pihak yang terkait, adanya motivasi yang timbul dari dalam diri setiap anggota untuk mengikuti kegiatan, adanya struktur organisasi yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi jika melanggar kewajiban, terbatasnya anggaran, kurangnya kualitas sumber daya manusia, adanya hubungan yang kurang baik antar anggota, kurangnya kemampuan (skill) yang dimiliki oleh pelaku UMKM serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Debraj Ray (1998). *Development Economics*, Princeton University

- Press. Chapters 16, 17 and 18. Dunn N William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edi, S. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, CV Alfabeta Bandung.
- Gunawan, S, (1989). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustakek Pelajar.
- Gunawan, S. (1996). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pelaksana Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Kemensos
- Noor, A. (2007). *Ilmu Sosial Dasar* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sunggono, B. (1994). *"Hukum dan Kebijaksanaan Publik"*. Sinar Grafika, Jakarta
- Soegijoko, (2001). *Kemiskinan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Soegikoko: Bandung. Utama,
- Prabawa. (1991). *Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Indhillco.